

SKRIPSI

**PENGARUH *GOVERNMENT SIZE, INTERGOVERNMENTAL REVENUE,*
DAN *CAPITAL EXPENDITURE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : PUTRI NATASYA FAUZIAH
NPM : 125239215

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPIAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Persetujuan

Nama	:	PUTRI NATASYA FAUZIAH
NIM	:	125239215
Program Studi	:	AKUNTANSI BISNIS
Judul	:	PENGARUH GOVERNMENT SIZE, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN CAPITAL EXPENDITURE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Juni-2025

Pembimbing:
AMIN WIJOYO, S.,E.,M.,AK
NIK/NIP: 10114001



Jakarta, Juni 2025

Pembimbing

Pengesahan

Nama : PUTRI NATASYA FAUZIAH
NIM : 125239215
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : PENGARUH GOVERNMENT SIZE,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN CAPITAL
EXPENDITURE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH
Title : THE EFFECT OF GOVERNMENT SIZE,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, AND CAPITAL
EXPENDITURE ON REGIONAL FINANCIAL
PERFORMANCE

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Program Studi
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada
tanggal 12-Juli-2025.

Tim Pengaji:

1. AGUSTIN EKADJAJA, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. AMIN WIJOYO, S.,E.,M.,AK
3. MERRY SUSANTI, S.E, M.Si, AK, CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMIN WIJOYO, S.,E.,M.,AK
NIK/NIP: 10114001



Jakarta, 12-Juli-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT., Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dari hati yang paling tulus kepada: Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan ketulusan kepada:

1. Bapak Amin Wijoyo, S.E.,M.,AK sebagai dosen pembimbing peneliti yang memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyusun skripsi ini dan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan dan mendidik penulis hingga sekarang yang tidak dapat dibalaskan dengan apapun.
5. Saudara kandung penulis, yang selalu ada untuk menghibur dan menemani penulis, Iting yang tiada hentinya memberikan doa.
6. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan pandangan baru dalam perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang selama ini banyak memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan penulis di Universitas Tarumanagara.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang sudah turut membantu penulis melalui rintangan dan kesulitan dalam kehidupan kampus dan penulisan karya tulis ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk menjadikan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan

Jakarta, Juni 2025

Peneliti,

Putri Natasya Fauziah

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

ABSTRAK

**PENGARUH *GOVERNMENT SIZE, INTERGOVERNMENTAL REVENUE,*
DAN *CAPITAL EXPENDITURE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah *government size*, *intergovernmental revenue*, dan *capital expenditure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan *audited* Tahun 2019-2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Statistik Keuangan Pemda Tahun 2019-2023 yang dipublikasikan dalam website Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu menggunakan keseluruhan populasi. Data yang diolah dengan menggunakan Eviews 12. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa *government size* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan *intergovernmental revenue* dan *capital expenditure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Peniliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian hingga kabupaten, kota maupun desa, selain itu mengeksplorasi variabel variabel independent lain termasuk yang dapat memediasi variabel independen terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, *Government Size, Intergovernmental Revenue Capital Expenditure*

TARUMANAGARA UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

JAKARTA

THE EFFECT OF GOVERNMENT SIZE, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, AND CAPITAL EXPENDITURE ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE

ABSTRACT

The objective of this study is to examine and analyze the effect of government size, intergovernmental revenue, and capital expenditure on regional financial performance. The data used in this research are secondary data derived from audited financial reports for the period 2019–2023 issued by the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Regional Financial Statistics for 2019–2023 published by the Central Bureau of Statistics (BPS). This study employs a saturated sampling technique, using the entire population. Data were processed using EViews 12. The results reveal that government size has a positive and significant effect on regional financial performance, whereas intergovernmental revenue and capital expenditure do not have a significant effect. Future research is recommended to expand the research objects to include regencies, cities, and villages, and to explore other independent variables, including potential mediating variables, that may influence regional financial performance.

Keywords: *Regional Financial Performance Government Size, Intergovernmental Revenue Capital Expenditure*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	3
3. Batasan Masalah	9
4. Rumusan masalah	9
B. Tujuan dan Manfaat Penilitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
A. Gambaran Umum Teori	11
Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
B. Defenisi Konseptual Variabel.....	12
1. Kinerja Keuangan Daerah	12
2. <i>Government Size</i>	14

3. <i>Intergovernmental Revenue</i>	15
4. <i>Capital Expenditure</i>	16
C. Kaitan Antar Variabel – Variabel	17
1. Pengaruh <i>Government Size</i> dengan Kinerja Keuangan Daerah	17
2. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> dengan Kinerja Keuangan Daerah.	18
3. Pengaruh <i>Capital Expenditure</i> dengan Kinerja Keuangan Daerah.....	19
D. Penelitian yang Relevan.....	19
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	24
1. Pengaruh <i>Government Size</i> terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	24
2. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> dengan Kinerja Keuangan Daerah.	25
3. Pengaruh <i>Capital Expenditure</i> dengan Kinerja Keuangan Daerah.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Dasar Penelitian.....	28
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	29
C. Operasional Variabel Dan Instrumen	29
1. Variabel Dependen.....	30
2. Variabel Independen	30
D. Analisis Data	32
1. Interpretasi Model Regresi.....	32
2. Uji Koefisien Determinasi <i>Adjusted R Square (Adjusted R²)</i>	33
3. Uji Simultan (Uji F)	33
4. Uji Statistik t (Uji Hipotesis Parameter Parsial)	33
E. Asumsi Analisis Data	34
1. Uji Statistik Deskriptif	34
2. Analisis Persamaan Regresi Data Panel.....	34
3. Uji Asumsi Klasik.....	34
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A.Deskripsi Subyek Penelitian.....	37
B.Deskripsi Objek Penelitian	38

C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data.....	38
1. Uji Statistik Deskriptif.....	39
2. Analisis Pemilihan Regresi Data Panel	46
3. Uji Asumsi Klasik.....	48
D. Hasil Analisis Data	53
1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda	53
2. Uji Koefisien Determinasi Berganda (<i>Adjusted R-Squared</i>)	54
3. Uji Simultan (Uji F).....	55
4. Uji Statistik t (Uji Hipotesis Parameter Parsial)	56
E. Pembahasan	57
1. Pengaruh <i>Government Size</i> Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD.....	57
2. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD	59
3. Pengaruh <i>Capital Expenditure</i> Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD	62
BAB V	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan dan Saran.....	67
1. Keterbatasan.....	67
2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Tabel Rekap Variabel Dependen dan Variabel Independen	32
Tabel 4.1 Data Penelitian.....	37
Tabel 4.2 Tabel Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.3 Tabel Uji Chow.....	47
Tabel 4.4 Tabel Uji Hausman	48
Tabel 4.5 Tabel Uji Normalitas	49
Tabel 4.6 Tabel Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.7 Tabel Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.8 Tabel Uji Durbin watson (DW)	52
Tabel 4.9 Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.11 Tabel Interpretasi Model Regresi	53
Tabel 4.12 Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	54
Tabel 4.13 Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F)	55
Tabel 4.14 Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t).....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pendapatan Daerah pada APBD Nasional	5
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	27
Gambar 4.1. Tren <i>Government Size</i>	41
Gambar 4.2. Tren <i>Intergovernmental Revenue</i>	42
Gambar 4.3. Tren <i>Capital Expenditure</i>	44
Gambar 4.4. Kinerja Keuangan Daerah.....	45
Gambar 4.5. Rata-Rata Nasional <i>Government Size</i> dan Rasio Efektivitas PAD.....	59
Gambar 4.6. Rata-Rata Nasional <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Rasio Efektivitas PAD	61
Gambar 4.7. Rata-Rata Nasional <i>Capital Expenditure</i> dari Rasio Efektivitas PAD ..	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data <i>Government Size</i> 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019--2023	74
Lampiran 2 Data <i>Intergovernmental Revenue</i> 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019-- 2023	76
Lampiran 3 Data Capital Expenditure 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019--2023 .	80
Lampiran 4 Data Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019--2023.....	83
Lampiran 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	84
Lampiran 6 Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	85
Lampiran 7 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	86
Lampiran 8 Hasil Uji <i>Random Effect Model</i>	86
Lampiran 9 Hasil Uji Chow.....	87
Lampiran 10 Hasil Uji Hausman	87
Lampiran 11 Hasil Uji Statistik F	87
Lampiran 12 Hasil Uji Statistik t	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Pada zaman orde baru, Indonesia menyelenggarakan sistem pemerintahan secara sentralisasi yaitu pemasatan seluruh kebijakan dan kewenangan pada tingkat tertinggi dalam struktur organisasi (Nuradhwati, 2019). Setelah berakhirnya orde baru dan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, setelah itu mengalami perubahan dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2008 yang perubahannya membahas lebih terperinci terkait teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah, selanjutnya digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan disempurnakan oleh UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemda. Penyempurnaan tersebut lebih menekankan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dan konsep otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi.

Sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara luas kepada pemda untuk menjalankan pemerintah yang efektif, mengelola sumber daya, mendistribusikan segala kebutuhan masyarakat dengan merata, membuat kebijakan daerah yang lebih demokratis dan tidak terpusat, hingga berfokus untuk menyejahterakan masyarakat guna mencapai tujuan bardirinya Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pemda diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999. Kebebasan yang diberikan kepada pemda dalam bentuk hak untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang paling tepat kepada

masyarakatnya agar tercipta masyarakat yang kreatif dan inovatif tanpa adanya intervensi yang berlebih dari pemerintah pusat (Simanjuntak, 2015).

Pemberian hak dan wewenang kepada pemda untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya sekaligus melaksanakan roda pemerintah dapat dikatakan tepat sasaran sebagai daerah yang maju dan berkembang apabila pemda mampu menciptakan penyelenggaraan yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, salah satunya melalui penerbitan Laporan Keuangan Pemda (LKPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dituangkan dalam laporan keuangan daerah dengan menganut prinsip tepat waktu pelaporan yang mengikuti standar yang berlaku. LKPD terdiri dari satu tahun pelaporan berbasis akrual yang terbagi menjadi laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. LKPD terdiri dari tujuh laporan yang menjelaskan mengenai posisi terkait transaksi keuangan yang dilakukan pemda. LKPD terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan bahwa LKPD yang disusun akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mulai dari masyarakat, lembaga pengawas, setiap wakil rakyat, lembaga pemeriksa, dan pihak-pihak yang berperan dalam memberi donasi, pinjaman, investasi hingga pemerintah pusat. maka dari itu informasi yang tercakup dalam LKPD harus spesifik dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pemakai (Mulia, 2019). Terdapat dua alasan utama penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagai berikut.

1. Jika dilihat dari sisi internal, laporan keuangan salah satu alat pengendalian dan evaluasi bagi pemda secara menyeluruh baik keseluruhan maupun unit-unit didalamnya.
2. Jika dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna laporan keuangan yang disampaikan oleh penanggungjawab daerah (kepala daerah). (Mahmudi, 2010 dalam Sahertian, 2016).

Jika dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi. Evaluasi tersebut secara berkala dapat dilakukan sebagai pengukuran kinerja keuangan. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja keuangan pemda yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 menerangkan bahwa pengukuran kinerja merupakan indikator penilaian kesesuaian sasaran, tujuan, dan capaian atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemda. Pengukuran kinerja yang dilakukan merupakan output atas penilaian yang sistematik dan berdasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (Nasution, 2018).

2. Identifikasi Masalah

Penilaian Kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu utama yaitu penerimaan, belanja, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi dari daerah tersebut (Insani, Rahayu, dan Erwati., 2023). Untuk melihat keberhasilan suatu pemda dalam mempertanggungjawabkan hak otonominya maka harus diukur menggunakan instrumen yang objektif. menurut Halim, 2008 dalam Sari & Mustanda, 2019 menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilihat dengan membandingkan periode terkini dengan periode sebelumnya dengan tujuan untuk menentukan kecenderungan yang terjadi pada saat pengelolaan yang dilakukan pemda.

Tidak hanya di Indonesia, salah satu contoh negara yang juga melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pada pemda di negaranya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengelolaan keuangan tersebut dapat ditemukan di Yunani. Beberapa faktor tersebut adalah *Gross Domestic Product (GDP)*, populasi penduduk, *real estate*, *capital*, dan *tourist*. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda berdasarkan kesembilan rasio keuangan yang terdiri dari rasio *Return on Equity (ROE)*, *profit margin*, *Return on Assets (ROA)*, *current ratio*, *assets turnover*, *debt/equity*, *long term liabilities/total assets*, *operating revenues/total revenues*, dan *operating revenues/operating expense* dipengaruhi oleh kesembilan rasio keuangan tersebut sedangkan rasio profitabilitas yang ditunjukkan dalam rasio ROA, ROE dan *profit margin* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemda terhadap kesembilan rasio keuangan tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas sektor pemerintah berbeda dengan sektor swasta. (Cohen, 2006 dalam Ratna Ayu, 2015).

Perbedaan sektor pemerintah dan sektor swasta ialah pemerintah tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan laba melainkan menggali potensi pendanaan daerahnya sendiri, Jika dilihat dari komposisi pendapatan daerah pada postur APBD, pendanaan dibagi tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan realisasi APBD nasional Tahun 2024 yang diperoleh dari data DJPK Kementerian Keuangan per data yang diterima SIKD per 26 September 2024, sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar 66% atau 501.772 miliar rupiah dari total pendapatan keseluruhan daerah sebesar 765.813,61 miliar rupiah.



Gambar 1.1 Pendapatan Daerah pada APBD Nasional

Intergovernmental revenue (Dana Perimbangan) yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan stimulus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, berdasarkan informasi dari ringkasan APBD TA 2017, pemda harus mengalokasikan 25% Dana Transfer Umum (DTU). DTU merupakan salah satu komposisi dana perimbangan yang diperuntukkan sebagai belanja infrastruktur. Belanja infrastuktur merupakan komponen dari belanja modal. Menurut (Syafira Frijunita dkk., 2021), Peningkatan belanja modal tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan PAD. Penyerapan belanja modal yang tidak merata di setiap provinsi yang ada di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor seperti perencanaan yang kurang tepat, pengelolaan yang tidak efektif hingga adanya kendala administratif, penyerapan belanja modal yang sedikit, dan tergolong rendah, jauh dari rancangan yang ditetapkan dalam APBD, sehingga menyebabkan penerimaan daerah yang tidak merata.

Fenomena ini menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang seharusnya bertujuan untuk mempercepat perekonomian, Namun karena minimnya penyerapan belanja modal berdampak pada minimnya penerimaan daerah tersebut. (Ilmawan dan Wahyudin, 2014 dalam Syafira Frijunita dkk., 2021). Percepatan laju perekonomian yang diharapkan oleh pemda bertujuan agar pemda mampu mengelola layanan publik, menjaga stabilitas sosial, dan menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan keamanan, dan infrastruktur dengan fokus utama untuk

menyejahterakan masyarakat. Percepatan laju perekonomian sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan yang baik, salah satu metode untuk menilai peningkatan kinerja keuangan pemda selain melihat indikator kegiatan, dapat dilakukan dengan cara melihat perbandingan rasio-rasio keuangan terhadap APBD. Menurut Adhiantoko, kinerja keuangan dapat diukur berdasarkan rasio seperti Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. (Siregar dan Mariana, dalam Alkhasani & Murtanto, 2024).

Kinerja keuangan pemda dalam penelitian ini dianalisis menggunakan rasio efektivitas PAD dengan cara membandingkan antara PAD yang dihasilkan dengan PAD yang telah dianggarkan. Menurut Sari dan Mustanda (2019), tingkat keefektifan kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh perbandingan realisasi dengan target PAD yang ditetapkan pemda tersebut, dikatakan efektif apabila realisasi PAD pada suatu tahun anggaran tercapai atau melebihi target yang telah ditetapkan. Kenaikan atau penuruan PAD suatu daerah berdasarkan kemampuan pemerintahnya dalam memanfaatkan, mengatur sumber-sumber pendapatan, belanja, dan pibiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Government size atau yang dikenal dengan Ukuran Pemda merupakan salah satu variabel dalam menjelaskan suatu struktur organisasi, besar kecilnya ukuran suatu pemda dapat diukur dari aset yang dimilikinya, dengan kata lain, kemampuan pemerintah untuk menghasilkan suatu aset. Namun, dalam kenyataannya, banyak aset disuatu daerah belum mampu menghasilkan pendapatan daerah secara lebih efektif dikarenakan kurangnya pemeliharaan aset tersebut. (Wijaya & Solikhi, 2021)

Pembiayaan dari pemerintah pusat atau yang disebut *Intergovernmental revenue* merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari APBN untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pelaksanaan roda pemerintahan yang efektif guna melayani

masyarakat. *Intergovernmental revenue* terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penjelasan tersebut tercantum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2, *Capital Expenditure* atau disebut Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk pengadaan atau pembelian aset tetap dan aset berwujud lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari satu periode. Menurut Andirfa dkk, 2016 dalam Ningsih, Syva & Rukmini, 2023, belanja modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti peningkatan infrastruktur daerah dan termasuk belanja yang rutin dilakukan seperti pemeliharaan.

Penelitian yang dilakukan terhadap tiga faktor di atas mulai dari *government size*, *intergovernmental revenue*, dan *capital expenditure* terhadap kinerja keuangan pemda di Indonesia telah banyak dilakukan, beberapa penelitian yang menunjukkan berpengaruh atau tidak berpengaruh diantaranya sebagai berikut.

- a. *Government size* dapat digambarkan dengan total aset yang dimiliki suatu daerah, dengan memadainya total aset yang dimiliki, maka pelayanan yang diberikan akan optimal, pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alvini, Basri & Hasan, 2018), (Wijaya & Solikhi, 2021), (Widya Safitri dkk., 2023), dan (Marhawai, 2015). Berbeda dengan hasil penelitian (Sari & Mustanda, 2019) (Ratna Ayu, 2015), (Ernawati & Jaeni, 2018), dan (Aafiah Millenia, 2022) yang menyatakan *government size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah keuangan, pemda harus mampu mengelola dan memanfaatkan aset agar dapat meningkatnya PAD daerah tersebut.
- b. *Intergovernmental revenue* atau yang disebut dengan dana perimbangan, memengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Semakin besar *intergovernmental revenue* yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka pendapatan asli daerah

tersebut akan meningkat. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Marhawai, 2015), (Gita, 2015), dan (Alvini dkk., 2018). Berbeda dengan hasil penelitian (Wijaya & Solikhi, 2021), (Ernawati & Jaeni, 2018), dan (Aafiah Millenia, 2022) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah pusat yang berakibat dana alokasi belum dapat digunakan secara efektif.

- c. *Capital expenditure* atau yang disebut dengan belanja modal akan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah dengan cara penggunaan belanja modal yang tepat sasaran. Belanja modal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019), (Alvini dkk., 2018), (Ningsih dkk., 2023), dan (Ernawati & Jaeni, 2018). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Nauw, 2021), (Maharani dkk., 2024), (Widya Safitri dkk., 2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh atas kinerja keuangan pemerintah dikarenakan belum optimalnya penggunaan belanja modal dan belum ditujukan agar mampu meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan di pemda. Pada penulisan ini, peneliti berfokus pada faktor *government size*, *intergovernmental revenue*, dan *capital expenditure* sebagai variabel independen, kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas PAD sebagai variabel dependen untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel independen tersebut terhadap peningkatan PAD suatu pemda dalam menjalankan hak otonominya. Selain itu, pembaruan dari penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Subjek penelitian yang digunakan berasal dari data laporan keuangan 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK. Peneliti ingin melihat secara menyeluruh apakah variabel independen yang digunakan memengaruhi kinerja keuangan di

seluruh provinsi, sedangkan beberapa penelitian sebelumnya hanya berfokus di satu provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau dll. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Government Size*, *Intergovernmental revenue*, dan *Capital Expenditure* terhadap Kinerja Keuangan Daerah”.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Pengaruh *Government Size*, *Intergovernmental revenue*, dan *Capital Expenditure* terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Variabel Independen yang digunakan berfokus pada *government size*, *intergovernmental revenue*, dan *capital expenditure*, dengan *variabel dependen* yaitu kinerja keuangan daerah pada 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2019 – 2024.

4. Rumusan masalah

Berteraskan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mempersempit permasalahan menjadi peninjauan, rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh *government size* terhadap kinerja keuangan pemda?
- b. Apakah terdapat pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemda?
- c. Apakah terdapat pengaruh *capital expenditure* terhadap kinerja keuangan pemda?

B. Tujuan dan Manfaat Penilitian

1. Tujuan Penelitian

Berteraskan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun sasaran dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap poin-poin berikut.

- a. Pengaruh *government size* terhadap kinerja keuangan pemda.
- b. Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemda.

- c. Pengaruh *capital expenditure* terhadap kinerja keuangan pemda.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemda sebagai regulator dan pelaksana, masyarakat setempat, dan peneliti di masa depan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan, unsur, pengetahuan, elemen dan fakta dasar terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemda, kemaslahatan dari penelitian ini sebagai berikut.

- a. Bagi Pemda diharapkan penelitian ini dapat memberikan dorongan pengelolaan kinerja keuangan yang tepat, efektif, efisien dan akuntabel, guna meningkatkan PAD untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan pemda dalam menjaga dan memanfaatkan aset secara efisien serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap aset daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperkaya informasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemda dan menjadi bahan acuan penelitian yang akan datang di bidang Akuntansi Sektor Publik (ASP).

DAFTAR PUSTAKA

- Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah provinsi, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Adiputra, A. K., Apriyanti, A., & Rohmah, K. L. (2020). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. *Global Financial Accounting Journal*, 4(2), 31. <https://doi.org/10.37253/gfa.v4i2.970>
- Alkhasani, M. R., & Murtanto. (2024). PENGARUH KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH, MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, TEMUAN AUDIT, DAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH. 1192, 304–317.
- Alvini, Y., Basri, M. Y., & Hasan, M. A. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah provinsi, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011- 2016). *Jurnal Online Mahasiswa FebJ*, 1(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/21643/20941>
- Andayani, Wuryan. (2007) Akuntansi Sektor Publik. Malang, Bayumedia Publishing
- Ernawati, & Jaeni. (2018). Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 73–81.
- Gita, M. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah provinsi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2). <https://doi.org/10.36080/jak.v13i1.2698>
- Insani, A., Rahayu, S., & Ernawati, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Maharani, B., Puspitasari, A., & Yantiana, N. (2024). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA

KEUANGAN PEMERINTAH.

- Manafe, H. A., Sia Niha, S., & Putu S. Putra, D. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah provinsi, Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1322>
- Marhwai. (2015). Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah provinsi, Ukuran Pemerintah provinsi dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 s.d 2014). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 49–58.
- Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi di Jawa Tengah. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 4, Issue 2).
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah provinsi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAHL*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>
- Nasution, D. A. D. (2018). ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH Dito. 2.
- Nauw, E. T. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* E-ISSN: 2460-0585.
- Ningsih, S., Syva, P. M., & Rukmini. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah provinsi Di Jawa Tengah Tahun 2019-2022. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 01, 1–9.
- Nuradhwati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Nurdin, A. A., & Tripuspitorini, F. A. (2022). Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020 The effect of liquidity on profitability in sharia commercial banks in Indonesia period 2015-. 2(2), 428–433.
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). *Analisis pengaruh belanja daerah dan PAD terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kalimantan Barat*. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat & Sekretariat Direktorat Jenderal.

Sahertian, A. B. (2016). ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SYARAT TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kediri).

Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah provinsi, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah provinsi. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>

Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Keuangan Pemerintah provinsi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 2(32), 236–242. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/365>

Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>

Syafira Frijunita, Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 10. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>

Utami, M. R., & Darmawan, A. (2018). Pengaruh Der, Roa, Roe, Eps Dan Mva Terhadap Harga Saham Pada Indeks Saham Syariah Indonesia. Journal of Applied Managerial Accounting, 2(2), 206–218. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.910>

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi

Wahyuni, T. (2015). Pengaruh goog governance..., Titik Dwi Wahyuni, FEB UI, 2015.

Widya Safitri, B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2023). The effect of pad, capital expenditures, government size, and budget changes on regional financial performance (in central java province in 2019-2021). Ijafibs, 10(4), 201–208. www.ijafibs.pelnus.ac.id

Wijaya, R., & Solikhi, A. (2021). Effect of Good Corporate Governance and Leverage on Profitability-Mediated Tax Avoidance (Study on Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016 – 2019). International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 11(2), 202–221. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS>